



RENJA TAHUN 2026

DINAS TENAGA KERJA
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH DATAR

DAN

Alamat :
Jalan MT. Haryono Nomor 10 Batusangkar



(0752) 574715



08116616149



www.TenagaKerjaPerindustrian.tanahdatar.go.id



1708



dTenagaKerjaPerindustrian@tanahdatar.go.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Ketentuan Umum
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematikan Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Rencana Program dan Prioritas Daerah 2026
2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Tahun Berjalan
3. Plafon Anggaran OPD Per Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Operasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpendoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagaimana dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan Perencanaan Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja. Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026. Ini merupakan dua tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra.

Mengingat arti strategis Dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah,

maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan Penganggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rancangan awal RKPD, menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
2. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD.
3. Hasil Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
4. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
5. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
6. Renja OPD juga mengakomodir program, kegiatan dan output dari program-program prioritas dalam Renja Dinas Provinsi serta Renja

Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

7. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) k. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026, memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan strategis di Kabupaten Tanah Datar guna mewujudkan keadaan satu tahun ke depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar ataupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif dan mendapat pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Dinas

Koperindag Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026;
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun ke depan;
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan;
4. Membuat acuan perencanaan yang membuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD;
5. Bahan Evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sisitematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Nakerin Tahun 2025.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terbentuk pada Bulan Januari Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Daerah oleh karena itu Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2026 dan Perkiraan Capaian Renja tahun 2024 dapat dilihat Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2025.

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Nakerin Kab. Tanah Datar
s/d Tahun 2025

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2025)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN (2019)	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Renstra dan Renja yang Disusun	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang	8 laporan	9 laporan	8 laporan	8 laporan	100	8 laporan	8 laporan	100

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2025)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN (2019)	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		Disusun								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Monitoring Kegiatan Dinas	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
		Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan	30 Org/Bln	30 Org/Bln	30 Org/Bln	30 Org/Bln	100	30 Org/Bln	30 Org/Bln	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Laporan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2025)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN (2019)	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	1 orang	0 orang	0 orang	0 orang	100	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	100	9 Paket	9 Paket	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	24 Paket	24 Paket	100	24 Paket	24 Paket	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Jumlah Dokumen yang Digandakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100	6 Paket	6 Paket	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu dan Rapat yang Disediakan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100	6 laporan	6 laporan	100

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2025)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN (2019)	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dalam Daerah dan Jumlah Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurar	Jumlah Materai, Perangko dan Paket Pengiriman yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Telepon, Tagihan Volume Air yang Digunakan, KWH Listrik dan Tagihan Internet	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantos	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Yang Disediakan	12 Laporan/4 jasa tenaga lainnya	12 Laporan/4 jasa tenaga	12 Laporan/4 jasa tenaga	12 Laporan/4 jasa tenaga	100	12 Laporan/4 jasa tenaga	12 Laporan/4 jasa	100

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2025)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN (2019)	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
				lainnya					tenaga	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayarkan Pajaknya (Roda 2)	3 Unit/1 jasa tenaga lainnya	3 Unit/1 jasa tenaga lainnya	3 Unit/1 jasa tenaga lainnya	3 Unit/1 jasa tenaga lainnya	100	3 Unit/1 jasa tenaga lainnya	3 Unit/1 jasa tenaga lainnya	100
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayarkan Pajaknya (Roda 4)	4 Unit/1 jasa tenaga lainnya	4 Unit/1 jasa tenaga lainnya	4 Unit/1 jasa tenaga lainnya	4 Unit/1 jasa tenaga lainnya		4 Unit/1 jasa tenaga lainnya	4 Unit/1 jasa tenaga lainnya	100
		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit/1 jasa tenaga lainnya	7 Unit/1 jasa tenaga lainnya	7 Unit/1 jasa tenaga lainnya	7 Unit/1 jasa tenaga lainnya		7 Unit/1 jasa tenaga lainnya	7 Unit/1 jasa tenaga lainnya	100
		1 THL Sopir	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2025)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN (2019)	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	2 unit	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	2 Unit Gedung/2 Jasa Tenaga lainnya	2 Unit Gedung/2 Jasa Tenaga lainnya	2 Unit Gedung/2 Jasa Tenaga lainnya	2 Unit Gedung/2 Jasa Tenaga lainnya	100	2 Unit Gedung/2 Jasa Tenaga lainnya	2 Unit Gedung/2 Jasa Tenaga lainnya	100
		2 THL Tenaga Pengaman Kantor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG TENAGA KERJA									
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja									

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2025)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN (2019)	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi									
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja pemula yang dilatih.	64 orang/ 3 jasa lainnya	64 orang/ 3 jasa lainnya	64 orang/ 3 jasa lainnya	64 orang/ 3 jasa lainnya	100	64 orang/ 3 jasa lainnya	64 orang/ 3 jasa lainnya	100
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Lembaga Swasta yang di bina	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	100	11 Lembaga	11 Lembaga	100
	Program Penempatan Tenaga Kerja									
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota									
	Pelayanan antar Kerja	Banyak jenis pelayanan menyangkut tenaga kerja	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100	10 Orang	10 Orang	100
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Banyak jenis pelayanan menyangkut tenaga	800 orang/2 jasa tenaga lainnya	800 orang/2 jasa tenaga	800 orang/2 jasa tenaga lainnya	800 orang/2 jasa tenaga	100	800 orang/2 jasa tenaga	800 orang/2 jasa tenaga	100

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2025)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN (2019)	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		kerja		lainnya		lainnya		lainnya	lainnya	
	Program Hubungan Industrial									
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta NonAfiliasi	Jumlah Asosiasi pekerja yang terfasilitasi	1 Asosiasi dan serikat Pekerja	1 Asosiasi dan serikat Pekerja	1 Asosiasi dan serikat Pekerja	1 Asosiasi dan serikat Pekerja	100	1 Asosiasi dan serikat Pekerja	1 Asosiasi dan serikat Pekerja	1 Asosiasi dan serikat Pekerja
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN									
	Penatausahaan izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam									

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2025)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN (2019)	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Daerah Kabupaten/ Kota									
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data pemanfaatan panas bumi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota									
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terlaksananya Pelatihan	1 Dokumen/ 3 jasa tenaga lainnya	1 Dokumen/ 3 jasa tenaga lainnya	1 Dokumen/ 3 jasa tenaga lainnya	1 Dokumen/ 3 jasa tenaga lainnya	100	1 Dokumen/ 3 jasa tenaga lainnya	1 Dokumen/ 3 jasa tenaga lainnya	100
		3 Orang THL	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan	Peningkatan Kualitas Produk	1 Dokumen/ 9 jasa	1 Dokumen/	1 Dokumen/ 9 jasa	1 Dokumen/	100	1 Dokumen/	1 Dokumen/	100

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2025)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN (2019)	
					TARGET RENJA TAHUN 2025	REALISASI RENJA 2025	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Sumber Daya Industri	melalui Pelatihan Proses Produksi	lainnya	9 jasa lainnya	lainnya	9 jasa lainnya		9 jasa lainnya	9 jasa lainnya	
		9 Orang THL	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pelatihan Pengembangan Produk	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Keikutsertaan dalam Event Promosi Produk Unggulan IKM Daerah	1 Dokumen/5 jasa tenaga lainnya	1 Dokumen/5 jasa tenaga lainnya	1 Dokumen/5 jasa tenaga lainnya	1 Dokumen/5 jasa tenaga lainnya	100	1 Dokumen/5 jasa tenaga lainnya	1 Dokumen/5 jasa tenaga lainnya	100
		5 Orang THL	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Kajian Indikator Kinerja sebagaimana Indikator Kinerja pada Renstra OPD serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Nakerin adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C 30
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KAB. TANAH DATAR
S/D TAHUN 2025

AKSI CAPAIAN IKU						ANGGARAN (RP)
KEGIATAN YANG DILAKUKAN	JADWAL PELAKSANAAN				PROGRAM/KEGIATAN	
	TW I	TW II	TW III	TW IV		
9	10	11	12	13	14	15
Pelaksanaan pembangunan sentra hortikultura	3%	10%	60%	100%	Program perencanaan dan pembangunan industri	1.542.226.380
Fasilitasi promosi produk IKM (promosi pameran Dekranasda propinsi, Inacraft, Bazar Cindua Mato)	2 event	1 event	3 even	3		457.304.290
Pelatihan bagi IKM				35 IKM		166.082.000

Bantuan peralatan bagi kelompok IKM	-	-		10 IKM		235.897.500
Melakukan pelatihan berbasis kompetensi	16	16	16		Program Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	473.821.600
Fasilitasi penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri	15	12	17		Program Penempatan Tenaga Kerja	50.874.800

N O	Indikator Kinerja	SPM	IKM	K O N D ISI A W AL	Target Renstra Perangkat Daerah					REALISASI CAPAIAN 2024	PROYEKSI		
					22	23	24	25	26		24	25	26
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Pelaksanaan pembangunan sentra hortikultura		0	-	-	1 Sentra Holty	0	0	1 Sentra Holty	-	-	-
		Fasilitasi standar		-	-	-	205 IK	-	-	205 IKM	-	-	-

		isasi produk dan pelaku IKM (Sertifikat halal, Sertifikat TKDN dan HKI merek)				M						
2	Jumlah wirausaha baru	Melakukan pelatihan berbasis kompetensi	-			224			224			
		Fasilitas penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri				80 orang			80 orang			
		Bantuan				5			5			

		n peralatan bagi kelompok IKM					kel ompok			kelompok			
		Kegiatan Pelatihan IKM					54 5			545			

Dari Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Pada indikator ini, terdapat dua kegiatan yang dilakukan untuk menunjang indikator tersebut.

1.1 Pelaksanaan pembangunan sentra hortikultura

Pembangunan gedung sentra hortikultura dilakukan pada awal 2024 yang diharapkan dapat menjadi sarana bagi IKM untuk pengolahan tomat menjadi produk saus tomat.

1.2 Fasilitasi standarisasi produk dan pelaku IKM (Sertifikat halal, Sertifikat TKDN dan HKI merek)

Pada tahun 2024 telah difasilitasi sebanyak 205 IKM dalam pengurusan sertifikat halal, TKDN dan HKI Merek.

2. Jumlah wirausaha baru

Dalam mencapai indikator Jumlah wirausaha baru, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melakukan 4 kegiatan untuk mencapai indikator tersebut, yaitu :

2.1 Melakukan pelatihan berbasis kompetensi.

Pada Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah melakukan pelatihan berbasis kompetensi yang diikuti sebanyak 224 pencari kerja pemula

2.2 Fasilitasi penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri

Sebanyak 80 orang pencari kerja telah di tempatkan pada perusahaan dalam dan luar negeri pada tahun 2024.

2.3 Bantuan peralatan bagi kelompok IKM

Bantuan peralatan bagi IKM berasal dari Pokir pada tahun 2024 sebanyak 5 IKM.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Program dan Kegiatan Dinas Nakerin Kab. Tanah Datar Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Prov. Sumatera Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah	Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah	1. Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumberdaya dan penguasaan teknologi 2. Mengembangkan usaha hilirisasi produk industri pengolahan 3. Meningkatkan kualitas produk industri	1. Peningkatan daya saing sektor industri 2. Pengembangan dan peningkatan sentra industri.

		4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia sektor industri	
--	--	--	--

Pada bidang Tenaga kerja :

1. Belum optimalnya dampak penyelenggaraan bursa kerja bagi pencari kerja di Kabupaten Tanah Datar sehingga lowongan pekerjaan yang disediakan banyak diisi dari luar Kabupaten Tanah Datar.
2. Masih perlunya pelatihan ketrampilan / kewirausahaan bagi pencari kerja di Kabupaten Tanah Datar sehingga diharapkan ada beberapa alternatif untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki.
3. Perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja yang masih terus terjadi.
4. Masih minimalnya sarana dan prasarana sebagai pendukung pelayanan publik diantaranya seperti belum adanya ruang bermain anak, ruang multimedia, dan kendaraan untuk mobilisasi pelayanan.
5. Angka pengangguran yang masih tinggi.
6. Lapangan kerja yang terbatas.
7. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.

Untuk pencapaian kinerja tahun 2026 dapat dirumuskan **Isu Strategis** sebagai berikut :

- 1) Perlunya peningkatan daya saing produk IKM melalui peningkatan kualitas produk, manajemen usaha, diversifikasi produk dan pengembangan pemasaran secara digital.

- 2) Pemenuhan standarisasi produk, pengawasan keamanan produk serta perlindungan hak kekayaan intelektual produk IKM daerah agar dapat bersaing baik tingkat lokal, regional, nasional maupun ekspor.
- 3) Perlunya Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah Kab. Tanah Datar sebagai dasar dan arah pengembangan industri daerah
- 4) Perlunya sinergi antar pihak terkait baik antar OPD, Perusahaan atau peluang usaha yang dapat di kembangkan dalam mengurangi angka pengangguran.

2.4 Review Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/P rogram/K egiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an Kiner ja	Pagu Indikatif	Urusan/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari			

bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Nakerin	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang	Rp167.032.800,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		Rp200.000.000,00
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
	Nakerin	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	16 Lembaga	1.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		Rp10.000.000,00
Pelayanan antar Kerja					Pelayanan antar Kerja			
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Nakerin	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	10 Orang	Rp1.000.000,00	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		Rp5.000.000,00
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			
	Nakerin	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1200 Orang	Rp50.376.800,00		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		Rp90.000.000,00

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Nakerin	-Cakupan pembinaan dan pengawasan hubungan industrial perusahaan dan pekerja	100 Perse n	Rp1.000.000,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan pembinaan dan pengawasan hubungan industrial perusahaan dan pekerja		Rp20.000.000,00
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Nakerin	Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial di tingkat perusahaan	100 %		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial di tingkat perusahaan		

Kabupaten/Kota								
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			
	Nak erin	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Rp5.000.000		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		Rp10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nak erin	- Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Nak erin	- persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Nak erin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Rp2.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp10.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nak erin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp1.500.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp8.000.000,00
	Nak erin	Persentase tertib Administrasi Keuangan	100 %			Persentase tertib Administrasi Keuangan		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Nak erin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	35 Orang/bul	Rp3.805.905.256,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan		

		Tunjangan ASN	an			Tunjangan ASN		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Nak erin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lapor an	Rp3.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp10.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nak erin	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian	100 %		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nak erin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Oran g	Rp1.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Rp10.000.000,00
	Nak	Persentase tertib	100			Persentase tertib		

	erin	Administrasi umum perangkat daerah	%			Administrasi umum perangkat daerah		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Nak erin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp2.500.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Rp10.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Nak erin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	0		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Nak erin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	Rp6.767.906,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Rp10.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Nak erin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp5.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu			

	Nak erin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lapor an	Rp3.500.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp10.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Nak erin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 Lapor an	Rp70.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp100.000.000,00
Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Nak erin	- persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Nak erin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lapor an	Rp1.250.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp5.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Nak erin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapor an	Rp250.000.000,0 0		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Rp250.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

	Nak ein	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapor an	Rp109.795.929,0 0		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Rp150.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Nak erin	- Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100 %			Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Nak erin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Rp121.488.400,0 0		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Rp180.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Nak erin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Rp2.828.164,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Rp10.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Nak erin	Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit	Rp61.376.800,00		Jumlah Gedung Kantor dan		Rp100.000.000,00

		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Nakerin	- cakupan pengelolaan dan pengembangan energi baru terbarukan	100 Perse	n		cakupan pengelolaan dan pengembangan energi baru terbarukan		
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Nakerin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp1.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp8.000.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Nakerin	- Pengembangan IKM Sentra Tenun dan Pengembangan IKM Pada sentra IKM Potensial	18 IKM			- Pengembangan IKM Sentra Tenun dan Pengembangan IKM Pada sentra IKM Potensial		
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Nakerin	- Pengembangan IKM pada Sentra Potensial			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pengembangan IKM pada Sentra Potensial		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			
	Nakerin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	1 Dokumen	Rp100.565.200,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Rp200.000.000,00

		Industri						
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			
	Nak erin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Doku men	Rp306.695.600,0 0		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Rp500.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
	Nak erin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Doku men	Rp141.462.000,0 0		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Rp250.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
	Nak erin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	1 Doku men	Rp267.894.000,0 0		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan		Rp350.000.000,00

	Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
--	--	--	--	--	--	--	--

2.6. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerah. Usulan rencana pembangunan dapat berasal melalui usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat Nagari, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten Tanah Datar hingga tingkat Propinsi Sumatera Barat.

Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan hasil Musrenbang yang telah di usulkan melalui Aplikasi SIPD oleh pihak Nagari/ Kecamatan yang dikoordinir dan diverifikasi oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tanah Datar. Usulan tersebut akan diteruskan ke OPD terkait untuk dilakukan Penyusunan Renja OPD tersebut. Namun untuk Tahun 2024 tidak terdapat usulan masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar .

Tabel TC.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Rencana Pembangunan Tahunan Kementrian/ Lembaga atau Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar adalah perumusan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lainnya tentang tenaga kerja dan perindustrian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan dibidang tenaga kerja dan perindustrian;
 - pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja dan perindustrian;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja dan perindustrian;
 - pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- dan

- pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian adalah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Berdasarkan Visi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 yang sudah ditetapkan sebagai berikut

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK)”.

Berdasarkan visi tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan mendukung Misi

Misi keempat yaitu *“Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha Mikro dan peningkatan investasi.”*

Misi Keempat *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.”*

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 menetapkan tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2026 yaitu :

1. Penurunan persentase angka pengangguran
2. Peningkatan Persentase Pencari kerja yang Kompeten
3. Peningkatan Realisasi Investasi di Daerah
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayan Publik
5. Peningkatan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral
6. Meningkatkan Pemberdayaan ekonomi kerakyatan di bidang industri

Berdasarkan tujuan di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kabupaten Tanah Datar menetapkan Sasaran Renja tahun 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterampilan tenaga Kerja yang Kompeten
2. Bertambahnya peluasan kesempatan Kerja
3. Meningkatkan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral
4. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pelayanan
5. Meningkatnya daya saing industri daerah

N o	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KINE RJA
1	Meningkatka n ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM	Meningkatka n Kesejahetaraa n masyarakat dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM	Meningkatny a Penyerapan Tenaga Kerja dan Wirausaha baru	Persentase Pencari Kerja yang dilatih berbasis kompetensi	
				Terciptanya wirusaha pemula (orang)	
				Persentase penempatan pencari kerja yang terdaftar	
				Tingkat Produktivitas tenaga kerja	
			Meningkatka n hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	
				Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin	50%

RENJA					2026
N o	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KINE RJA
2	Meningkatkan Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dibidang Industri	Meningkatnya kontribusi sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB	Meningkatnya daya saing industri daerah	Jumlah IKM Informal menjadi IKM Formal (unit)	
				Jumlah IKM Informal menjadi IKM Formal (unit)	

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berpedoman pada Tema pembangunan, prioritas pembangunan dan isu strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 dan berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Nakerinkabupaten Tanah Datar, maka Dinas Nakerin Kabupaten Tanah Datar menyusun 6 Program, 14 kegiatan dan 20 sub kegiatan pada tahun 2026 sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019. Pemilihan program dan kegiatan yang dilakukan dalam Renca Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 berdasarkan kebutuhan dalam rangka percepatan Pembangunan dan mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Datar yaitu:

- 1) Meningkatkan Pengamalan Agama, Adat dan Budaya;
- 2) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Penciptaan Usahawan Baru, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi;
- 3) Meningkatkan Produksi dan Produktifitas serta Nilai Tambah Hasil Pertanian;
- 4) Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Unggulan Daerah;
- 5) Meningkatkan Kualitas SDM;
- 6) Meningkatkan Infrastruktur Daerah, Penanggulangan Bencana Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas;

Dari tujuh Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 ada 2 Prioritas yang didukung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yaitu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Penciptaan Usahawan Baru, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas; Untuk mendukung hal tersebut telah ditetapkan program dan kegiatan. Adapun prioritas program Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

Program : 1. Perencanaan Tenaga Kerja

- Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Program : 2. Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

- Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi
- Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
- Kegiatan : 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Kegiatan : 3. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
- Pelaksanaan konsultasi produktivitas pada Perusahaan Kecil

Program : 3. Penempatan Tenaga Kerja

- Kegiatan : 1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten Kota
- Pelayanan Antar Kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Perluasan Kesempatan Kerja
2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair/Bursa Kerja
3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

Program : 4. Hubungan Industrial

- Kegiatan : 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang haya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

Program : 5. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan : 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Kegiatan : 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan : 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program : 6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Kegiatan : 1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan percepatan pengembangan, penyebaran, pembangunan Sumber Daya Industri, pembangunan sarana prasarana dan peran serta masyarakat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026

Pada Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar mempunyai 5 (Lima) Program, 13 (empat belas) kegiatan dan 29 (dua puluh) Sub Kegiatan, untuk tahun 2026 sebagaimana berikut:

I.	SEKRETARIAT : Rp4.448.412.455,00,-
II.	Bidang Tenaga Kerja : Rp220.409.600,00
III.	Bidang Perindustrian : Rp817.616.800,00

Adapun program-program strategis untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Bidang Tenaga Kerja		
1.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp168.032.800,00
2.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp51.376.800,00
3.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp1.000.000,00

Bidang Perindustrian		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Rp1.000.000,00
2.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp816.616.800,00

BAB V

PENUTUP

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar sebagai lembaga teknis dari perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya telah berupaya mencurahkan segala daya dan upaya untuk mencapai kinerja yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan disusun sebagai pedoman rencana kinerja Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian untuk tahun 2026.

Rencana Kerja merupakan tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2026.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati perkenankan kami untuk menyampaikan ribuan terima kasih atas semua dukungan moral dan materil kepada semua pihak (seluruh staf Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, pimpinan dan satuan kerja terkait), sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik dan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT, Amin ya robbal'alam.

Batusangkar, Januari 2026

KEPALA DINAS

TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN TANAH DATAR

NUSIRWAN, SH, S.Sos, MT

NIP. 19690522 199202 1 001

